



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Skh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXX Bin xxx**, umur 70 tahun, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 31 Desember 1952), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Xxx, Xxx, Rt. 001 Rw. 013, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon I**;

**XXX Binti XXX**, Umur 57 tahun (Sukoharjo,15-03-1966), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Xxx, Xxx, Rt. 001 Rw. 013, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Skh, tanggal 16 Januari 2023, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 1991, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa

Hal. 1 dari 11, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/33/X1/1991 tertanggal 24 bulan November tahun 1991) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu (1) orang anak, di antaranya bernama XXX.

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon: Nama Xxx, Umur 18 tahun 7 bulan (Sukoharjo,20-06-2004), Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT.001 RW. 013, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo.

Dengan calon suaminya:

Nama Xxx, Umur 24 tahun (Sukoharjo,24-05-1998), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Dukuh Gunung Butak, RT. 003 RW. 013, Desa Karangmojo, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor :51kua/11.11.12/PW.01/1/2023 tertanggal 12 Januari 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan lebih kurang sebesar 2.3 juta setiap bulannya.

Hal. 2 dari 11, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Xxx untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban orang tua supaya mencegah anaknya menikah di bawah umur serta risiko-risiko bagi anak yang menikah di bawah umur, seperti terhentinya pendidikan anak, ancaman kesehatan reproduksi anak, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya hingga mendapatkan putusan, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon sudah membayar panjar untuk acara pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 14 Januari 2013. Bukti tersebut

Hal. 3 dari 11, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 1 September 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/33/X1/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx tanggal 24 November 1991. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 31 Desember 2019. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 6 Desember 2004, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 13 Oktober 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
  7. Fotokopi Ijazah atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Xxx, tanggal 29 Mei 2019. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 13 Agustus 2009, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 31 Oktober 2022. Bukti tersebut

Hal. 4 dari 11, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Karangmojo 01, Kecamatan Xxx, tanggal 12 Juni 2010. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Xxx, tanggal 14 Januari 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.11);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Xxx (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah, terakhir lulus SMP;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Xxx atas kemauan sendiri, tanpa dipaksa;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah kenalan dengan Xxx selama sekitar 4 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Xxx;
- Bahwa calon mempelai wanita siap menikah dengan Xxx dengan sungguh-sungguh;

2. Xxx (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria sudah tidak sekolah, terakhir lulus SD;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan perempuan yang bernama Xxx atas kemauan sendiri, tanpa dipaksa;
- Bahwa benar calon mempelai pria sudah kenalan dengan Xxx selama sekitar 4 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria sudah berkerja sebagai Supir Truk dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah perbulan;
- Bahwa calon mempelai pria siap menikah dengan Xxx dengan sungguh-sungguh;

Hal. 5 dari 11, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skh



Bahwa telah didengar pula keterangan dua orang tua calon mempelai pria, yang pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai pria telah menyetujui rencana pernikahan anaknya, Xxx, dengan anak Pemohon, Xxx;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria bersedia untuk memberikan bantuan materiil maupun non materiil terhadap Xxx dan Xxx bilamana telah menikah;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria siap memberikan bimbingan terhadap rumah tangga Xxx dan Xxx supaya tetap terjaga keutuhannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Xxx untuk melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, menolak untuk melaksanakannya dengan alasan kurang umur, sedangkan menurut Pemohon pernikahannya sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat Pemohon sudah membayar panjar untuk acara pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah oleh Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan orang tua dari kedua calon mempelai, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sekitar 4 bulan menjalin hubungan cinta dan sama-sama menginginkan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sama-sama lajang serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai Supir Truk dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah perbulan;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama menyetujui pernikahan keduanya, bahkan telah membayar panjar untuk acara pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyatakan bersedia membantu mencukupi kebutuhan ekonomi kedua calon mempelai bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya bila telah menikah, dan bersedia pula untuk membantu menjaga keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pengadilan, pembatasan tersebut pada dasarnya untuk mengantisipasi agar pasangan yang menikah dapat benar-benar mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selamat, dan tidak berakhir dengan perceraian. Terkait

Hal. 7 dari 11, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan-kemungkinan risiko negatif yang timbul, Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, calon besan, dan kedua calon mempelai. Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyatakan kesanggupan serta kesungguhannya untuk memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada calon mempelai baik yang bersifat materi maupun non materi demi menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga calon mempelai nantinya. Demikian juga kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan penuh kesungguhan dan memperhatikan pesan dan nasihat Pengadilan terkait hal-hal yang harus dilakukan, dihindari, atau dihindari oleh mempelai, baik sebagai suami maupun istri;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria telah berumur 24 tahun, sehat fisik dan psikis, dan telah bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah perbulan. Dengan demikian, calon mempelai pria telah cukup siap baik dari segi fisik maupun materiil untuk menikah. Demikian juga calon mempelai Wanita, sekalipun usianya belum genap 19 tahun, tetapi menurut penilaian Hakim di persidangan yang bersangkutan dalam kondisi sehat fisik maupun psikis, sehingga telah cukup siap untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sama-sama sudah tidak lagi menjalani Pendidikan formal, sedangkan keduanya telah saling mengenal (*ta'aruf*) selama sekitar 6 bulan dan telah menyatakan diri siap untuk menikah. Artinya pernikahan yang mereka inginkan adalah sudah dalam perencanaan yang sungguh-sungguh, bukan karena keterpasaan. Oleh sebab itu, menyatukan calon mempelai dalam sebuah ikatan pernikahan yang resmi, sebagaimana dikehendaki oleh kedua belah pihak, menurut Pengadilan adalah langkah yang lebih tepat karena dengan menikahkannya akan lebih mungkin melahirkan kemasalahatan psikologis maupun sosial bagi kedua mempelai dan keluarga besarnya, daripada menunda pernikahannya atau bahkan memisahkannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesiapan dan kesanggupan dari pihak-pihak terkait seperti di atas maka Pengadilan berpendapat potensi-potensi negatif seperti kegagalan dalam pernikahan calon mempelai yang

Hal. 8 dari 11, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur 19 tahun, seperti anak Pemohon, akan dapat diantisipasi atau setidaknya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon (Xxx) dengan calon suaminya (Xxx) tidak terbukti ada kondisi yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan secara Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menikahkan anak Pemohon (Xxx) dengan calon suaminya (Xxx), sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (Xxx) dengan calon suaminya (Xxx) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, akan tetapi KUA tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama telah dapat dikesampingkan, sehingga KUA Kecamatan Xxx dapat melaksanakan dan mencatat pernikahan antara anak Pemohon (Xxx) dengan calon suaminya (Xxx);

Menimbang, bahwa dispensasi kawin adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxx untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxx.
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Agung Wibowo Putro, S.Ag

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 10 dari 11, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp300.000,00
4. <u>Meterai</u>	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp445.000,00</b>

Hal. 11 dari 11, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)